

## Efektivitas Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Dalam Upaya Penanggulangan Stunting

Anitha Nurak<sup>1</sup>, Lina Andayani<sup>2</sup>, Sahrhani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Email: [anitahnurak@gmail.com](mailto:anitahnurak@gmail.com)

### Abstrak

Kabupaten Mamberamo tengah merupakan salah satu kabupaten di provinis papua dengan tingkat prevalensi stunting tinggi yakni, sebesar 42,4% dari jumlah keluarga. Kabuapten Mamberamo tengah memiliki perkiraan balita terdampak stunting sebanyak 1.340 bayi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan stunting pada kabupaten Mamberamo Tengah. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus yang melibatkan para pemangku kepentingan hingga implementer program di tingkat masyarakat (puskesmas) dan kampung/kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kerja yang berasal dari pemerintah pusat, maupun Kabupaten Mamberamo tengah telah terlaksana meski dalam melaksanakan upaya percepatan penurunan/penanggulangan stunting di daerahnya masih memiliki banyak kendala. Untuk saat ini, program-program kerja yang telah dilakukan diantaranya adalah; Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS), Program intervensi berupa Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman, kebijakan inovatif Kebijakan inovasi Emo-Demo. menetapkan arah strategi kebijakan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kependudukan dan KB yaitu: a) meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di setiap puskesmas ; b) melakukan advokasi dan KIE tentang kependudukan dan KB denan menghadirkan penyuluh Kb di tingkat kabupaten ; c) melakukan pembinaan ketahanan remaja yang dilakukan melalui Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) dan mendorong kegiatan remaja yang positif dengan meningkatkan status kesehatan dna mendapatkan pendidikan; h) mengupayakan peningkatan pembangunan keluarga dan KIE tentang pentingnya pengasuhan tumbuh kembang anak dan pentingnya keluarga berencana;

**Kata Kunci:** *program, , stunting, pemerintah daerah , Mamberamo tengah.*

### Abstrack

Central Mamberamo Regency is one of the regencies in Papua province with a high stunting prevalence rate of 42.4% of the number of families. Mamberamo Regency is currently estimated to have 1,340 babies affected by stunting. This study aims to identify and analyze local government efforts to tackle stunting in Central Mamberamo district. The research method was carried out qualitatively through in-depth interviews and focus group discussions involving stakeholders to program implementers at the community (puskesmas) and village/kelurahan levels. The results of the study show that work programs originating from the central government, as well as the Mamberamo Regency are being carried out, although there are still many obstacles in carrying out efforts to accelerate stunting reduction/handling in the region. For now, the work programs that have been carried out include; Formation of a Team for the Acceleration of Stunting Reduction (TPPS), an intervention program in the form of a Safe Food Awareness Community Movement, an innovative Emo-Demo innovation policy. determine the direction of the policy strategy in carrying out development in the population and family planning sector, namely: a) increasing access to and quality family planning services in every health center; b) conduct advocacy and KIE on population and family planning by presenting family planning counselors at the district level; c) conducting youth resilience development through the Adolescent Reproductive Health Information and Counseling Center (PIK-KRR) and encouraging positive youth activities by improving health status and getting an education; h) seeking to increase family development and IEC regarding the importance of caring for child growth and development and the importance of family planning;

**Keywords :** *program, stunting, local government , Mamberamo Tengah.*

## PENDAHULUAN

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tidak maksimal saat dewasa (MCA Indonesia, 2014).

Negara-negara berkembang dan salah satunya Indonesia memiliki beberapa masalah gizi pada balita, di antaranya wasting, anemia, berat badan lahir rendah, dan stunting. Stunting merupakan kondisi kronis yang menggambarkan terhambatnya pertumbuhan karena malnutrisi jangka panjang. Stunting menurut WHO Child Growth Standard didasarkan pada indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) dengan batas (z-score)  $< -2$  SD (WHO, 2010). Indikator TB/U menggambarkan status gizi yang sifatnya kronis, artinya muncul sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama seperti kemiskinan, perilaku pola asuh yang tidak tepat, sering menderita penyakit secara berulang karena higiene dan sanitasi yang kurang baik (DepKes RI, 2007).

Stunting pada balita merupakan konsekuensi dari beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan kemiskinan termasuk gizi, kesehatan, sanitasi dan lingkungan (KemenKes RI, 2013). Faktor utama penyebab stunting yaitu : a. Asupan makanan Manusia membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan merupakan sumber energi untuk menunjang semua kegiatan atau aktivitas manusia. Seseorang tidak dapat menghasilkan energi yang melebihi dari apa yang diperoleh dari makanan kecuali jika meminjam atau menggunakan cadangan energi dalam tubuh. Namun kebiasaan meminjam ini akan dapat mengakibatkan keadaan yang gawat, yaitu kekurangan gizi khususnya energi (Suhardjo, 2003) b. Penyakit Infeksi Rendahnya sanitasi dan kebersihan lingkungan pun memicu gangguan saluran pencernaan, yang membuat energi untuk pertumbuhan teralihkan kepada perlawanan tubuh menghadapi infeksi (Schmidt dan Charles, 2014).

Sebuah riset lain menemukan bahwa semakin sering seorang anak menderita diare, maka semakin besar pula ancaman stunting untuknya (Cairncross dan Sandy, 2013). Selain itu, saat anak sakit, lazimnya selera makan mereka pun berkurang, sehingga asupan gizi makin rendah. Maka, pertumbuhan sel otak yang seharusnya sangat pesat dalam dua tahun pertama seorang anak menjadi terhambat. Dampaknya, anak tersebut terancam menderita stunting, yang mengakibatkan pertumbuhan mental dan fisiknya terganggu, sehingga potensinya tak dapat berkembang dengan maksimal (MCA Indonesia, 2015) c. Pelayanan Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan Keadaan sanitasi lingkungan yang kurang baik memungkinkan terjadinya berbagai jenis penyakit antara lain diare, kecacingan, dan infeksi saluran pencernaan. Apabila anak menderita infeksi saluran pencernaan, penyerapan zat. Zat gizi akan terganggu yang menyebabkan terjadinya kekurangan zat gizi. Seseorang yang kekurangan zat gizi akan mudah terserang penyakit dan mengalami gangguan pertumbuhan (Supariasa, et.al., 2013).

Stunting adalah masalah gizi utama yang akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Selain itu, stunting dapat berpengaruh pada anak balita pada jangka panjang yaitu mengganggu kesehatan, pendidikan serta produktifitasnya di kemudian hari. Anak balita stunting cenderung akan sulit mencapai potensi pertumbuhan dan perkembangan yang optimal baik secara fisik maupun psikomotorik (Dewey KG dan Begum K, 2011). Gangguan perkembangan adalah kondisi anak tidak mampu mencapai tugas perkembangan pada waktu diperkirakan. Gangguan dapat terjadi pada banyak area perkembangan, misalnya pada motorik, bahasa, sosial, atau berpikir.

Grantham Mc Gregor menyimpulkan bahwa perkembangan motorik dan kognitif berhubungan erat dengan status gizi yang dinilai berdasarkan Tinggi Badan/Umur (Husaini, et.al., 2002). Stunting menyebabkan terhambatnya perkembangan motorik kasar maupun halus, karena pada anak stunting terjadi keterlambatan kematangan sel-sel saraf terutama di bagian cerebellum yang merupakan pusat koordinasi gerak motorik (Mc Gregor dan Henningham, 2005). Stunting yang terjadi pada masa anak merupakan faktor risiko meningkatnya angka kematian, kemampuan kognitif, dan perkembangan motorik yang rendah serta fungsi-fungsi tubuh yang tidak seimbang (Allen dan Gillespie, 2001).

Beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menangani masalah stunting (Siswati, 2018) diantaranya : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. Undang–undang No. 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005–2025 menyatakan bahwa pembangunan pangan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor meliputi produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan

dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya. Selain itu, melalui program pembangunan nasional Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019, menetapkan bahwa pada tahun 2019, Indonesia dapat, menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi 100% rakyat Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015–2019. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015–2019 menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan 2015–2019 adalah program Indonesia sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat. Salah satu sasaran pokok adalah meningkatnya status kesehatan gizi ibu dan anak. Dalam RPJM 2015–2019 telah ditetapkan target penurunan prevalensi stunting balita 0-23 bulan menjadi 28% pada 2019.

Permenkes No.23/2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi. Permenkes tersebut menyatakan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diperlukan upaya perbaikan gizi perseorangan dan perbaikan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kelompok rawan gizi.

Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2016-2019 Kebijakan strategis pangan dan gizi fokus pada : a. Ketersediaan pangan b. Keterjangkauan pangan c. Pemanfaatan pangan d. Perbaikan gizi masyarakat e. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi. Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2015-2019 Misi yang tertuang dalam rencana strategis BKKBN yang berkaitan dengan malnutrisi pada anak termasuk stunting adalah: a) mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera (misi ke-4) dan mewujudkan Indonesia yang berdaya saing (misi ke-5).

Dalam kaitannya mewujudkan keluarga yang sehat sejahtera, BKKBN telah menetapkan arah strategi dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kependudukan dan KB yaitu: a) meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas; b) advokasi dan KIE tentang kependudukan dan KB; c) pembinaan ketahanan remaja yang dilakukan melalui Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) dan mendorong kegiatan remaja yang positif dengan meningkatkan status kesehatan dna mendapatkan pendidikan; d) memahami nilai-nilai pernikahan; e) mencegah kehamilan yang tidak dikehendaki; f) peningkatan pembinaan remaja tentang Generasi Berencana (GenRe); g) pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja guna meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak dan remaja; h) peningkatan pembangunan keluarga dan KIE tentang pentingnya pengasuhan tumbuh kembang anak dan pentingnya keluarga berencana; i) mengembangkan Kampung KB sebagai lintas sektor.

Undang–Undang No.36/2009 tentang Kesehatan Undang–undang No. 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa arah perbaikan gizi adalah meningkatnya mutu gizi perorangan dan masyarakat melalui perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik dan kesehatan, peningkatan akses dan mutu teknologi, dan peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Peraturan Presiden (Perpres) No.42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Perpres ini diikuti dengan Kerangka Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Gizi Dalam Rangka Seribu Pertama Kehidupan (Gerakan 1.000 HPK), penjelasan 1.000 HPK akan dibahas bab selanjutnya.

Berbagai masalah yang menjadi faktor penyebabnya dan bukan hanya soal faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Melainkan juga masalah kebersihan lingkungan sekitar rumah yang menjadi masalah penyebab. Beberapa hal yang menjadi faktor risiko masuk kategori Kronis akut antara lain, masih rendahnya cakupan pemberian ASI eksklusif usia 6-23 bulan (39,4%), rendahnya inisiasi menyusui dini (42,3%) urutan ke-30 dari 34 Provinsi. Rendahnya cakupan imunisasi dasar 12-23 Bulan (50,5%). Tingginya proporsi balita ISPA (33,3%), Balita diare (7,5%), serta Kecacingan (7,3%), Campak (4,7%). Selain itu juga diperparah oleh rendahnya proporsi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak (57%) terendah di Indonesia dan minimnya pengetahuan ibu tentang pola asuh anak dan pemberian makanan bergizi. Praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah melahirkan.

Pada wilayah Mamberamo tengah sendiri ketersediaan fasilitas kesehatan Rumah Sakit hanya 1(satu) Puskesmas tersedia 8 (delapan) serta Puskesmas Pembantu tersedia 9 (sembilan) dengan jumlah warga per kabuapten sebanyak 50.685 dengan jumlah kampung atau desa sebanyak 59 kampung , hal ini menjadi mengkhawatirkan karena rasio ketersediaan fasilitas kesehatan dengan masyarakat yang dilayani sangatlah timpang dan tidak layak dijadikan standar kesehatan apalagi sebagai upaya memutus mata rantai stunting.

Penelitian ini mencoba mengidentifikasi dan menganalisa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten tersebut dalam menurunkan prevalensi stunting di daerahnya. Perlu adanya program pencegahan terjadinya malnutrisi, di puskesmas atau di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Terkhusus pada masalah stunting ini, perlu pendekatan yang lebih strategis.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, agar dapat diperoleh deskripsi tentang Upaya pemerintah kabuapten Mamberamo tengah untuk menurunkan prevalensi stunting di daerahnya. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrument kunci.

Wawancara pemangku kepentingan dilakukan di tingkat kabupaten untuk menggali program intervensi stunting yang telah dilakukan di level kabupaten dan pemerintah kabupaten memastikan pelaksanaan intervensi terkait penanggulangan stunting di wilayahnya. Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan gejala-gejala atau masalah-masalah yang dapat terjadi pada masa sekarang berdasarkan pada pendekatan dan teknik yang sifatnya objektif. Untuk menentukan metode apa yang dipakai dalam suatu kegiatan penelitian yang dilakukan, ditentukan oleh tujuan dan sasaran penelitian itu sendiri.

Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan panduan pertanyaan terbuka. Para informan diwawancara maksimal 120 menit dengan menggunakan panduan wawancara yang telah diuji coba sebelumnya. Selama wawancara berlangsung informan menyadari bahwa mereka akan direkam. Hasil rekaman tersebut segera ditranskrip dan diberikan kode berbeda setiap informannya.

Analisis Data yang diolah merupakan hasil dari wawancara. Semua data dari wawancara berupa format teks dalam bentuk transkrip dan catatan tambahan pewawancara. Buku kode akan dikembangkan berdasarkan tujuan studi ini, semua analisis data akan didasarkan pada buku kode. Setelah semua transkrip dan catatan pewawancara terkumpul, analisis data akan menjalankan koding report dan koding memo termasuk membuat kutipan yang mendukung. Analisis akan difokuskan untuk menjawab tujuan studi. Hasil awal akan didiskusikan dengan tim peneliti dan kelompok penasehat untuk membuat narasi dan interpretasi serta pengembangan rekomendasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Adapun peran pemerintah ialah dengan merumuskan kebijakan daerah yang bersifat membangun dan inovatif dengan mendukung upaya percepatan pencegahan stunting; termasuk peningkatan peran kepala distrik dan kepala kampung dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian percepatan pencegahan stunting di wilayahnya. Pemerintah daerah Kabupaten Mamberamo tengah terkhusus pada OPD terkait berupaya melakukan sosialisasi kebijakan terkait upaya percepatan pencegahan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada distrik dan kampung.

Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) menjadi Salah satu program pemerintah provinsi Papua yang membantu pemerintah daerah kabupaten Mamberamo Tengah, kegiatan ini adalah bentuk komitmen dan implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Gubernur Papua menerbitkan Surat Keputusan nomor 188.4/140/Tahun 2022, Tanggal 24 Maret 2022 tentang Susunan Keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Papua Tahun 2022. Secara keseluruhan Provinsi Papua masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar untuk menurunkan *prevalensi stunting* yang saat ini berada diatas rata-rata nasional yaitu 29,5 % sedangkan prevalensi stunting rata-rata nasional adalah 24,5 %. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) yang dibentuk dapat bersinergi serta berkolaborasi dalam melaksanakan program serta kegiatan dalam rangka penanganan stunting di Provinsi Papua sehingga konvergensi terhadap sasaran prioritas dapat berjalan secara efektif.

Program intervensi berupa Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman. Yang bertujuan terbentuknya kader pada desa yang diintervensi mampu mengedukasi masyarakat mengenai pangan yang aman dan bermutu, program Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) yang bertujuan mewujudkan makanan jajanan anak sekolah yang aman, bermutu dan bergizi serta pengawasan produk pangan mulai dari produksi hingga distribusi (*pre market* dan *post market*), agar produk pangan yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat terjamin, aman, bermutu dan bermanfaat.

Berdasarkan hasil penelitian ini upaya dari pemerintah daerah kabupaten Mamberamo tengah dalam menurunkan masalah stunting dilaksanakan dalam beberapa kegiatan yang pertama dilakukan dengan cara meningkatkan mutu gizi dengan pendampingan keluarga sadar gizi melakukan sosialisasi dan pertemuan, serta menyampaikan informasi soal gizi terkait stunting. Kabupaten Mamberamo tengah bekerja sama dengan lembaga nirlaba (GAIN (Global Alliance For Improved Nutrition )) sebuah lembaga nirlaba yang bergerak pada menangani masalah kesehatan. Kerjasama ini menjadi peluang bagi Dinas terkait yakni dinas kesehatan Mamberamo tengah untuk memperkenalkan sebuah konsep edukasi masyarakat dari GAIN yakni Emo-Demo (Emotional Demonstration) yakni metode edukasi yang menggugah emosi peserta pelatihan untuk memahami gizi dengan lebih baik, sehingga tercipta perubahan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi makanan.

Kebijakan inovasi Emo-Demo ini biasanya dilakuak di sela-sela kegiatan posyandu sembari menunggu peserta lain untuk hadir, mengingat jarak tempuh psoyandu yang cukup jauh. Masyarakat bgitu antusias saat diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi ini. Melalui kegiatan ini membawa Kabupaten Mamberamo Tengah juga meraih penghargaan sebagai kabupaten dengan kategori inovatif dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi. Penghargaan yang diberikan Kemendagri sebagai peringkat pertama dan inovatif dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi merupakan kerja keras dalam beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja) maupun masyarakat yang ada di lima distrik.

Demi mewujudkan keluarga yang sehat sejahtera, BKKBN perwakilan Papua bekerja sama dengan pemerintahan Mamberamo tengah telah menetapkan arah strategi kebijakan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kependudukan dan KB yaitu: a) meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di setiap puskesmas ; b) melakukan advokasi dan KIE tentang kependudukan dan KB denan menghadirkan penyuluh Kb di tingkat kabupaten ; c) melakukan pembinaan ketahanan remaja yang dilakukan melalui Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) dan mendorong kegiatan remaja yang positif dengan meningkatkan status kesehatan dna mendapatkan pendidikan; h) mengupayakan peningkatan pembangunan keluarga dan KIE tentang pentingnya pengasuhan tumbuh kembang anak dan pentingnya keluarga berencana;

Pemerintah daerah Mamberamo tengah juga melakukan Rapat evaluasi data stunting yang diawali dengan pemaparan progress aksi penanganan dan pencegahan stunting yang dipaparkan oleh Koordinator Pokja Stunting Kabupaten Mamberamo Tengah. Tujuan kegiatan konvergensi dan Rad Stunting ini dilakukan untuk evaluasi data stunting pada 7 OPD terkait untuk meningkatkan sistem pengelolaan data stunting, intervensi OPD terkait. Sehingga kinerja penyelenggaraan stunting dari aksi 1 sampai dengan aksi 8 dapat terukur dan valid baik diawal maupun diakhir nanti. Karena penanganan dan untuk pencegahan stunting ini dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama seperti daerah lain yang telah kami kunjungi. Oleh karena itu perlu sumbangsih dan kerjasama dari instansi terkait sangat diharapkan. Dalam kegiatan konvergensi dan Rad Stunting tersebut, hadir pula pokja stunting Kabupaten Mamberamo Tengah yang berkomitmen dan bekerja keras demi menyelesaikan masalah stunting ini. perlu adanya kerjasama antara lini sektor dan lini program oleh OPD terkait dalam rangka mencegah stunting yang ada di Mamberamo Tengah.

Dalam rangka pelaksanaan percepatan pencegahan anak stunting, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah berkomitmen melaksanakan program pencegahan dan tata laksana gizi buruk pada balita, yang merupakan salah satu intervensi prioritas dalam program percepatan pencegahan anak stunting. Sebagaimana yang diketahui bahwa anak kurang gizi akut (gizi kurang dan gizi buruk) berisiko 3 kali menjadi stunting dan anak gizi buruk berisiko 12 kali lebih besar untuk meninggal dibandingkan anak gizi baik.

Salah satu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam penanganan gizi buruk pada balita dibuktikan dengan pengadaan RUTF ini. RUTF merupakan produk terapi gizi yang padat zat gizi, termasuk vitamin dan mineral sesuai dengan rekomendasi badan Kesehatan Dunia (WHO) dan juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk tata laksana balita gizi buruk tanpa komplikasi medis melalui tata laksana rawat jalan di tingkat masyarakat.

Dalam pelaksanaan kebijakan baik dari tingkatan provinsi dan kabupaten menemui permasalahan atau factor kendala yang mempengaruhi jalanya kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan penanggulangan stunting ini memiliki beberapa kendala seperti masalah keamanan yang masih belum stabil di wilayah kabupaten Mamberamo Tengah menyebabkan jalanya kebijakan pencegahan stunting menjadi berjalan lambat. Hal ini mempengaruhi



jumlah kesehatan yang meninggalkan wilayah ini dikarena masalah keamanan tersebut. Permasalahan Kurangnya tenaga kesehatan dengan latar belakang pendidikan Gizi yang bersedia ditempatkan pada pelosok wilayah kabupaten Mamberamo tengah mengakibatkan kurangnya jumlah personel dalam pelayanan kesehatan. Hal ini berakibat Banyaknya tenaga yang melakukan kerja rangkap sehingga mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas utamanya.

Permasalahan stunting menempati posisi yang sangat strategis dalam permasalahan pembangunan kesehatan karena stunting yang sangat tinggi di beberapa wilayah dan sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan kesehatan yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, karena stunting telah menjadi bagian dari kesehatan manusia yang memberi andil dalam peletakan dasar pembangunan kualitas sumberdaya manusia serta kualitas kehidupannya. Dengan demikian adanya program pencegahan stunting akan memberikan dampak yang baik untuk kesehatan masyarakat yang sehat, cerdas, sejahtera dan bahagia. Untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat bukanlah hal yang mudah, untuk keberhasilan kegiatan tersebut harus mendapat dukungan dari berbagai pihak serta melakukan persiapan secara maksimal dan terarah.

Keberhasilan program pencegahan stunting salah satunya dapat dilihat dari seberapa efektifnya tahap pelaksanaan program tersebut. Suatu program dikatakan berjalan dengan efektif apabila rencana yang telah dibuat sesuai dengan tujuan program atau dengan kata lain dapat diukur melalui perbandingan output atau hasil pelaksanaan program dengan rencana serta tujuan dari program tersebut. Melihat beberapa hal tersebut peneliti memiliki pemikiran bahwa program tersebut dapat dilakukan penelitian dengan mengukur efektivitas dari pelaksanaan program yang telah dilakukan oleh penyelenggara program tersebut dengan mengaplikasikan pada beberapa pengembangan pertanyaan terkait dengan efektivitas, hambatan dan upaya yang dihadapi dalam penyelenggaraan program tersebut. "Efektivitas program merupakan capaian yang di peroleh atau kondisi akhir output dari suatu pekerjaan atau program, dengan kata lain sebagai suatu pengukuran akan tercapainya target atau tujuan secara matang yang telah direncanakan sebelumnya"(Nurjannah Noci, 2017: 45).

## **SIMPULAN.**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, Efektivitas Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Dalam Upaya Penanggulangan Stunting telah membentuk beberapa kebijakan seperti ; Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS), Program intervensi berupa Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman, kebijakan inovatif Kebijakan inovasi Emo-Demo. menetapkan arah strategi kebijakan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kependudukan dan KB yaitu: a) meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di setiap puskesmas ; b) melakukan advokasi dan KIE tentang kependudukan dan KB dengan menghadirkan penyuluh Kb di tingkat kabupaten ; c) melakukan pembinaan ketahanan remaja yang dilakukan melalui Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) dan mendorong kegiatan remaja yang positif dengan meningkatkan status kesehatan dna mendapatkan pendidikan; h) mengupayakan peningkatan pembangunan keluarga dan KIE tentang pentingnya pengasuhan tumbuh kembang anak dan pentingnya keluarga berencana;maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan atas program-program yang sudah dijalankan dalam rangka memastikan pencapaian tujuan program sebagaimana yang diharapkan. Hal ini pada akhirnya menyebabkan program yang dijalankan tidak mencapai target sasaran, sehingga upaya untuk penanggulangan dan penurunan stunting menjadi kurang tepat sasaran apalagi efektif. Sementara itu, terkait kerjasama dan sinergi lintas sektor terkait upaya penanggulangan stunting yang dimulai dari kampung hanya perlu pengoptimalan dalam pelaksanaannya saja agar dapat terlihat signifikansi hasil yang diharapkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus, Erwan P. 2015. Implementasi Kebijakan Publik: Yogyakarta.Gava Media.
- Elan Satriawan, Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 22 November 2018.
- J. Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pertama. CV. Jejak, 2018.
- Izwardy, Doddy., 2019, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Stunting di Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 100 Desa Prioritas pada 10 Kabupaten Prioritas Stunting. Desember 2017

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia., 2018, Hasil Utama Riskesdas 2018
- Kementerian Kesehatan. (2020). Situasi Stunting di Indonesia. Jendela Data Dan Informasi Kesehatan. Kementerian Kesehatan. (2021).
- Buku Saku Hasil Studi Status Gizi (SSGI) tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2021.
- Meliasari, D. (2019). Hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian stunting pada balita di Paud Al Fitrah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah PANNMED*. Nickols, F. (2016).
- Strategy, Strategic Management, Strategic Planning, Strategic Thinking. Nugrahani, F. (2014). Metode penelitian kualitatif (1st ed.). Solo: Cakra Books
- Ni Ketut Aryastai, dan Ingan Tarigan. Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan*, Vol. 45, No. 4, Desember 2017: 233-240
- Pritasari, Kirana., 2018. Upaya Percepatan Penurunan Stunting: Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2018 & Rencana Tindak Lanjut Tahun 2019 Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia, *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan Edisi 1 Semester I Tahun 2018*, ISSN 2088-270 X
- Syamsuadi, A. (2017). Membangun Demokrasi Pemerintahan di Riau Dalam Perspektif Budaya Melayu. *Jurnal Dinamika Pemerintahan (JDP)*, 1(1), 1-10.
- Sugianto, A. (2021). Analisis Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial*.
- Kemenkes RI. 2019. Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI). Jakarta: Kemenkes RI.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting), 2017 TNP2K. 2017. "100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Penanganan Anak Kerdil (Stunting)."